

## **BAB IV**

### **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Analisis isu strategis Rancangan RPJMD 2016-2021 dimulai dari penelaahan permasalahan, pengkajian lingkungan strategis baik internal maupun eksternal pada semua bidang urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Purworejo dan perumusan kriteria strategis berdasarkan tujuan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan pembobotannya serta masukan isu strategis penyusunan KLHS RPJMD 2016-2021, maka dirumuskan kesimpulan isu strategis yang akan diselesaikan dengan program pembangunan daerah 2016-2021.

#### **4.1. Permasalahan Pembangunan**

Identifikasi permasalahan pembangunan diperoleh dari penelaahan gambaran umum kondisi daerah pada periode 2010-2015 dan hasil penelaahan evaluasi capaian kinerja RPJMD 2011-2015, maka dirumuskan permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah.

Pembidangan permasalahan pembangunan di Kabupaten Purworejo disesuaikan dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Purworejo, yang mencakup: (i). Bidang urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (ii). Bidang urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; (iii). Bidang urusan pemerintahan pilihan; dan (iv). Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

##### **4.1.1. Permasalahan Penyelenggaraan Bidang urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

###### **1. Pendidikan**

- Masih rendahnya kualifikasi tenaga pendidik PAUD jenjang S1/D4.

- Masih rendahnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- Belum tercapainya penuntasan wajib belajar 9 tahun.
- Belum memadai dan meratanya fasilitas/sarana penunjang pendidikan di setiap jenjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca.
- Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan
- Masih terdapat angka putus sekolah yang belum tertampung dalam pendidikan formal dan non formal.
- Masih tingginya disparitas mutu disemua jenjang pendidikan.
- Belum meratanya cakupan layanan pendidikan non formal.

## 2. Kesehatan

- Masih perlu ditingkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan.
- Masih tingginya kasus penyakit menular terutama Malaria.
- Belum sesuainya sarana kesehatan sesuai standar kesehatan;
- Belum terpenuhinya tenaga medis dan tenaga paramedis

## 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Masih terbatasnya akses penduduk terhadap air minum, permukiman layak huni dan sanitasi yang layak.
- Belum semua ruas jalan dan jembatan dalam kondisi baik
- Terdapat kemacetan jalan utama Kutoarjo – Purworejo sehingga perlu diantisipasi jalan alternatif.
- Keterbatasan akses di sisi timur kota Purworejo memerlukan pembangunan jalan lingkar timur Purworejo.

- Keterbatasan akses antar desa memerlukan peningkatan status jalan poros desa dan jembatan poros desa.
- Belum optimalnya kinerja layanan irigasi/daerah irigasi kewenangan Kabupaten
- Masih tingginya jumlah desa rawan air minum dan kekeringan.
- Perda RTRW belum relevan dengan dinamika pembangunan.

#### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Masih rendahnya cakupan Ketersediaan rumah layak huni.

#### 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu
- Belum terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki

#### 6. Sosial.

- Masih adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial / PMKS
- Masih tingginya tingkat kemiskinan.

#### 4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Bidang urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

##### 1. Tenaga kerja;

- Masih tingginya pengangguran;

##### 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Masih adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender
- Masih adanya kekerasan pada perempuan dan anak

### 3. Pangan;

- Masih ada desa rawan pangan
- Masih rendahnya rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan
- Kurangnya penganekaragaman konsumsi pangan
- Masih terbatasnya tenaga penguji mutu pangan.
- Masih minimnya diversifikasi pangan di masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

### 4. Pertanahan;

- Masih adanya permasalahan pertanahan

### 5. Lingkungan hidup;

- Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- Masih rendahnya Rumah Tangga yang menerapkan 3R ( Reuse, Reduce, Recycle )
- Masih banyaknya perusahaan dan instalasi milik pemerintah (pasar, puskesmas, RPH) yang belum memiliki dokumen lingkungan.

### 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- Belum semua penduduk memiliki dokumen kependudukan.
- Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

### 7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- Belum optimalnya tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat.
- Masih lemahnya tata kelola pemerintahan desa.

### 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk,
- Masih rendahnya kesadaran laki-laki untuk ber-KB.

- Masih banyaknya keluarga yang belum sejahtera.

#### 9. Perhubungan;

- Masih adanya wilayah – wilayah yang belum terjangkau akses angkutan umum yang secara ekonomis kurang layak diselenggarakan oleh masyarakat.
- Perlunya evaluasi jaringan trayek
- Masih banyak kendaraan yang terlambat diujikan kembali

#### 10. Komunikasi dan informatika;

- Belum optimalnya pemanfaatan media informasi
- Belum adanya integrasi system informasi berbasis Teknologi Informasi yang dimiliki pemerintah daerah.

#### 11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- Masih rendahnya perkembangan Usaha Mikro dan Kecil.
- Masih rendahnya kualitas dan daya saing produk Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi syarat ( SNI, PIRT).
- Masih adanya koperasi yang tidak sehat

#### 12. Penanaman Modal

- Masih minimnya investor yang masuk purworejo
- Kurangnya promosi penanaman modal
- Belum optimalnya Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu (One Stop Service).
- Belum terlaksananya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

#### 13. Kepemudaan dan olah raga;

- Masih rendahnya prestasi di bidang olahraga
- Kurangnya Sarana Prasarana penunjang pembinaan dalam keolahragaan dan kepemudaan.
- Kurangnya event - event sebagai wahana pengembangan diri bidang kepemudaan dan olahraga.

14. Statistik;

- Masih terlambatnya *Time Release* dan tingkat akurasi data.
- Masih lemahnya data sektoral pada Perangkat Daerah.

15. Persandian;

- Belum optimalnya penyelenggaraan persandian daerah

16. Kebudayaan;

- Belum optimalnya pengelolaan bangunan bersejarah
- Masih sedikitnya event-event/pagelaran seni budaya tradisonal

17. Perpustakaan

- Belum optimalnya peran perpustakaan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat
- Terbatasnya koleksi bahan pustaka
- Belum tersedianya perpustakaan yang representatif

18. Kearsipan.

- Belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan.
- Belum representatifnya Depo Arsip
- Masih minimnya Khasanah kearsipan

4.1.3. Permasalahan Penyelenggaraan Bidang urusan pemerintahan pilihan

1. Kelautan dan perikanan;

- Belum optimalnya produksi ikan tangkap maupun ikan budidaya.

2. Pariwisata;

- Belum optimalnya kualitas aksesibilitas infrastruktur penunjang pariwisata

- Perlunya peningkatan kualitas Sumber daya manusia dan kelembagaan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.
- Kurangnya promosi pariwisata yang melibatkan semua pihak.

### 3. Pertanian;

- Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian.
- Masih belum berkembangnya kegiatan Agribisnis.
- Masih tingginya luas alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian.

### 4. Kehutanan;

- Belum optimalnya penanganan Lahan kritis
- Kurangnya upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

### 5. Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Masih perlunya koordinasi penanganan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ( Penerapan energy baru terbarukan, Penambangan tanpa izin, Rumah tangga belum berlistrik)

### 6. Perdagangan;

- Tertib niaga dan perlindungan konsumen sangat lemah
- Masih banyak kondisi pasar yang rusak
- Lemahnya pengawasan distribusi produk
- Belum optimalnya jaringan kerjasama perdagangan

### 7. Perindustrian;

- Belum optimalnya kegiatan Agroindustri

### 8. Transmigrasi.

- Perlunya koordinasi penanganan transmigrasi di daerah.

4.1.4. Permasalahan Penyelenggaraan Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

1. Perencanaan;

- Masih perlunya peningkatan kualitas produk perencanaan daerah.
- Belum tersedianya SDM fungsional perencana

2. Keuangan;

- Kurang optimalnya sumber-sumber pendapatan daerah
- Belum proporsionalnya komposisi belanja daerah.
- Belum sesuai standar harga sesuai perkembangan

3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

- Belum tepatnya redistribusi dan distribusi PNS daerah.
- Masih lemahnya pengembangan kompetensi SDM aparatur sipil Negara.
- Belum memadainya sarana dan prasarana kerja Aparatur.

4. Penelitian dan pengembangan

- Belum berkembangnya budaya inovasi di masyarakat
- Belum adanya kerangka regulasi, kelembagaan dan infrastruktur untuk mendukung SIDA
- Belum berkembangnya penelitian dan pengembangan bidang urusan kewenangan daerah.
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan

5. Pembinaan dan pengawasan

- Minimnya media pengaduan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan.
- Belum optimalnya Peran APIP sebagai *consultant, catalyst* dan *quality assurance*
- Belum maksimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan



6. Kebijakan dan koordinasi pelayanan administratif
  - Masih lemahnya fungsi koordinasi di tingkat pemerintah daerah.
  - Belum optimalnya pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan menuju Good Governance.
  - Perlu disesuaikan kelembagaan perangkat daerah dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.
  - Belum terintegrasinya gerakan revolusi mental di kalangan birokrasi
7. Penyelenggaraan fungsi DPRD
  - Masih perlu optimalisasi fungsi DPRD.
  - Masih perlunya peningkatan kapasitas alat kelengkapan DPRD dan sekretariat DPRD
8. Penyelenggaraan tugas-tugas camat
  - Belum seimbang antara beban kerja dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia di tingkat kecamatan
  - Belum terlaksananya implementasi Sistem Informasi Desa
  - Belum memadainya kapasitas pelayanan publik kecamatan.
  - Besarnya jangkauan rentang kendali ke desa oleh Camat.

## **4.2. Lingkungan Strategis**

### **4.2.1. Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan)**

Lingkungan internal yang dikaji dalam bagian ini, mencakup: (i) Letak strategis, (ii) Kondisi Demografi, dan (iii) Kewenangan Daerah; (iv). Aparatur Daerah; (v). Kemiskinan; (vi). Pertumbuhan ekonomi; (vii). Infrastruktur publik.

## 1. Letak Strategis Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo secara geografis terletak antara  $7^{\circ}32'$  –  $7^{\circ}54'$  LS dan  $109^{\circ}47'28''$  –  $110^{\circ}08'20''$  BT. Kabupaten Purworejo berjarak 120 Km dari Ibu Kota Jawa Tengah (Semarang), dan 520 Km dari Ibu Kota Negara (Jakarta). Luas wilayah daratan sebesar 1.034,81 km<sup>2</sup>, sedangkan untuk luas wilayah laut sebesar 84 km<sup>2</sup>. Batas wilayah Kabupaten Purworejo meliputi sebelah utara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang; sebelah timur Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); sebelah barat Kabupaten Kebumen dan sebelah selatan Samudera Indonesia.

Secara administratif Kabupaten Purworejo terdiri dari 16 Kecamatan, 469 Desa dan 25 Kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Bruno, yaitu sebesar 108,43 km<sup>2</sup> dan tersempit adalah Kecamatan Kutoarjo dengan luas wilayah 37,59 km<sup>2</sup>.

## 2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo menurut hasil Sensus Penduduk pada tahun 2010 adalah 694.404 jiwa. Sedangkan kondisi pada akhir tahun 2014 adalah 708.038 jiwa. Dilihat dari persebarannya, Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 12 % dan 8% dari jumlah penduduk Kabupaten Purworejo.

Sebagian besar Penduduk Purworejo berusia antara 15–64 Tahun. Rasio beban ketergantungan di Purworejo tahun 2014 adalah 53,92. Artinya 100 penduduk usia produktif (15-64) rata-rata menanggung beban 53,92 penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 keatas).

Kepadatan penduduk Kabupaten Purworejo rata-rata 684,22 orang/km<sup>2</sup>. Dari sisi kewilayahan, terdapat tiga kecamatan yang kepadatan penduduknya di atas 1.000 orang/km<sup>2</sup> yaitu Kecamatan Purworejo dengan kepadatan penduduk sebesar 1.601,25 orang/km<sup>2</sup>, Kecamatan Kutoarjo dengan kepadatan penduduk sebesar 1.575,37

orang/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Bayan dengan kepadatan penduduk sebesar 1.075,41 orang/km<sup>2</sup>. Hal ini disebabkan karena tiga kecamatan tersebut memang merupakan kawasan Aglomerasi yaitu kawasan strategis tumbuh cepat Kota Purworejo-Kota Kutoarjo. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Kaligesing dengan kepadatan penduduk sebesar 396,53 orang/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Bruno dengan kepadatan penduduk sebesar 406,34 orang/km<sup>2</sup>. Dua kecamatan tersebut memang merupakan daerah dengan kondisi geografis berupa pegunungan yang sebagian wilayahnya memiliki hutan yang cukup luas.

Laju pertumbuhan penduduk Purworejo dari tahun 2013-2014 adalah 0,3954%. Rata-rata pertumbuhan penduduk Purworejo pertahun sebesar 0,531%. Pertumbuhan penduduk Kecamatan yang di atas rata-rata Kabupaten Purworejo adalah Kecamatan Grabag, Purwodadi, Bagelen, Purworejo, Banyuurip, Bayan, dan Gebang.

Dengan kepadatan penduduk, rasio beban ketergantungan dan laju pertumbuhan penduduk, membawa tantangan ketidakseimbangan antara *ecology footprint* pada sisi demand dan *carrying capacity* pada sisi supplynya, sehingga perlu untuk mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup agar pelaksanaan program-program pembangunan daerah dapat dipertanggungjawabkan dari aspek keseimbangan social, ekonomi dan lingkungan.

### 3. Kewenangan Daerah

Kekuatan bagi daerah untuk mengelola urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

- a. mengelola program pembangunan daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
- b. mengelola penataan organisasi pemerintah daerah yang sesuai dengan bidang urusan kewenangan;
- c. mengelola keuangan daerah yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah;

- d. mengelola pembangunan kawasan perdesaan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan;
- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan Baik;
- f. melaksanakan program strategis nasional. “Program Strategis Nasional” adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 4. Aparatur Daerah

Jumlah aparatur daerah 10.391 PNS, jumlah Kompetensi aparatur daerah sesuai jenjang pendidikan D4/S1 (50%), SMA/D1 (22%), D3 (9%), S2 (8%), D2 (7%), SMP (3%), SD (1%), S3 (2 orang). Jumlah PNS jabatan struktural 8%; jumlah jabatan fungsional tertentu 61%, jumlah jabatan fungsional umum 31%.

#### 5. Kemiskinan.

Masih adanya rumah tangga miskin (angka kemiskinan 14,41%) yang tersebar di 59 desa pada 16 kecamatan, hal ini membawa implikasi kebijakan untuk memprioritaskan program-program pembangunan daerah dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, menambah lapangan kerja serta meningkatkan dan pemerataan pembangunan di semua wilayah.

#### 6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo cenderung stagnan pada kisaran angka 5%. Pada tahun 2011-2012 adalah dari 5,64%, turun menjadi 4,59%, meningkat menjadi 5,11% pada tahun 2013, turun menjadi 4,63% pada tahun 2014, meningkat menjadi 5,09% pada tahun 2015.

## 7. Infrastruktur Publik

Kualitas infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi, drainase, sanitasi dasar, air bersih masih perlu peningkatan. Kondisi Jalan dalam keadaan baik mencapai 76,55%; kondisi jembatan dalam kondisi baik mencapai 92,12%; kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 52,50%; kondisi drainase perkotaan dalam kondisi baik mencapai 22,65%; cakupan akses sanitasi layak mencapai 80,36%; cakupan air bersih mencapai 86,48%.

### 4.2.2. Lingkungan Eksternal (Peluang dan Ancaman)

Lingkungan eksternal yang dikaji dalam bagian ini, mencakup: (i). Pembangunan Bandara New Yogyakarta; (ii). NAWACITA dan Isu Strategis Pembangunan Jawa Tengah; (iii). MEA; (iv). Pembangunan Berkelanjutan Post 2015 (SDGs) dan isu Perubahan Iklim; (v). Bencana.

#### 1. Pembangunan Bandara New Yogyakarta

Adanya rencana Pembangunan Bandara Internasional New Yogyakarta di Kulonprogo yang berbatasan dengan Purworejo membawa implikasi tantangan kedepan, meliputi :

- a. Perlu meninjau kembali kembali RTRW 2011-2031;
- b. Perlu mengikuti perkembangan kawasan sebagai kawasan Border City/Aerotropolis;
- c. Perlu berbenah diri untuk menyambut bandara dengan menyiapkan program-program pembangunan berkelanjutan.

#### 2. Peluang Sembilan Agenda Prioritas Nasional NAWACITA dan Isu strategis Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Prioritas Pembangunan NAWACITA tertuang dalam RPJMN 2014-2019 dan isu strategis pembangunan provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD 2013-2018, merupakan peluang pemerintah kabupaten Purworejo untuk selalu menyelaraskan dan mengharmonisasikan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Purworejo dalam RPJMD 2016-2021.

Kesembilan agenda prioritas NAWA CITA :

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi social Indonesia.

Prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah tentu saja dalam rangka menyelesaikan isu strategis yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pengurangan Kemiskinan
- b. Pengurangan Pengangguran
- c. Pembangunan Infrastruktur
- d. Kedaulatan Pangan
- e. Kedaulatan Energi
- f. Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah

Isu strategis Jawa Tengah tersebut merupakan tugas yang harus diemban oleh Kabupaten/Kota se Jawa Tengah untuk

bersama-sama menjawab peluang tersebut dalam pembangunan daerah masing-masing Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

### 3. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 sebagai pasar tunggal perdagangan memerlukan kesiapan pemerintah kabupaten Purworejo untuk menyambut sistim perdagangan bebas ASEAN yang bertumpu pada daya saing dan produktifitas disemua lini produk local untuk selalu meningkatkan nilai tambah dan mutunya serta meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki Kabupaten Purworejo agar dapat bersaing dengan dengan tenaga kerja dari luar daerah.

### 4. Agenda Pembangunan Berkelanjutan Post 2015 (SDGs) dan Isu Perubahan Iklim (“Climate Change”).

Setelah berakhirnya era MDGs (2000-2015) dan mulai pada 17 Goals Tujuan Pembangunan Berkelanjutan hasil Kesepakatan global *Sustainable Development Goals* (**SDGs**) (2015-2030) dan isu global perubahan iklim menantang pemerintah kabupaten Purworejo menyusun program-program pembangunan daerah dalam RPJMD tahun 2016-2021 dengan memprioritaskan target-target daerah untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi perubahan iklim, yakni dengan memformulasikan sasaran pembangunan daerah.

Fenomena perubahan iklim merupakan anomali cuaca yang dapat membawa dampak sektor pertanian sebagai sector basis perekonomian Kabupaten Purworejo. Anomali cuaca tersebut mempengaruhi produksi dan produktivitas pertanian, yang berdampak pada upaya meningkatkan dan memantapkan ketersediaan pangan.

Anomali cuaca ini dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor yang sering terjadi di Kabupaten Purworejo. Ancaman ini harus diwaspadai dengan menerapkan mitigasi dan adaptasi yang baik terhadap perubahan iklim.

Hasil pelingkupan isu strategis KLHS RPJMD 2016-2021, maka isu strategis pembangunan berkelanjutan, berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penurunan kualitas Sumberdaya air, tanah dan udara.
- b. Penurunan kualitas Lingkungan Hidup khususnya Keanekaragaman hayati.
- c. Pengelolaan Persampahan dan limbah belum berjalan optimal
- d. BudidayaPertanian yang belum menerapkan “*Good Agriculture Practise*” (GAP).
- e. Penyelenggaraan Penataan Ruang menghadapi kendala dalam aspek pengendalian dan pemanfaatan ruang.

#### 5. Bencana

Potensi bencana yang ada di Kabupaten Purworejo, meliputi : Longsor, Banjir, Tsunami, kekeringan, gelombang pasang.

### 4.3. Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada setiap urusan wajib, pilihan dan fungsi penunjang urusan, memperhatikan lingkungan strategis sebagaimana telah diuraikan diatas, dan mempertimbangkan kriteria – kriteria penentuan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tabel dibawah, maka permasalahan strategis yang memegang peranan penting/strategis diselesaikan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan.
2. Masih rendahnya prestasi pemuda dan olahraga.
3. Masih sedikitnya penyelenggaraan event budaya serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
4. Belum optimalnya layanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
5. Masih lemahnya ketahanan air.
6. Belum optimalnya infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah



7. Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah dibidang pertanian, pariwisata, industri, koperasi, usaha mikro kecil menengah, perdagangan dan investasi
8. Belum optimalnya ketahanan pangan.
9. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup
10. Belum terwujudnya kemandirian desa
11. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
12. Belum optimalnya Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah (ketentraman ketertiban masyarakat, kerentanan konflik sosial/kehidupan beragama) serta pengelolaan bencana
13. Masih rendahnya inovasi daerah dan teknologi tepat guna

Tabel 4.1  
Matrik Kriteria dan Pembobotan Penentuan Permasalahan  
Pembangunan Daerah yang Memegang peranan penting

NO	KRITERIA	BOBOT
1	Memiliki pengaruh yang besar/significant terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah	20
2	Dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat	15
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
4	Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi	10
5	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15
6	Merupakan kewenangan daerah	25
7	Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani	5
	TOTAL	100

Penetapan isu strategis dilakukan dengan cara memetakan permasalahan – permasalahan strategis kedalam frase atau kalimat isu strategis.

Tabel 4.2  
Penetapan Isu Strategis

NO	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN YANG MEMEGANG PERANAN PENTING UNTUK DISELESAIKAN	PENGGOLONGAN ISU STRATEGIS
<b>1</b>	Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan.	Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan
<b>2</b>	Masih rendahnya prestasi pemuda dan olahraga.	Tata Kelola Pemerintahan Daerah
<b>3</b>	Masih sedikitnya penyelenggaraan event budaya serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah	Peningkatan Pengelolaan Potensi Daerah
<b>4</b>	Belum optimalnya layanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.	Kualitas dan Pemerataan Akses Kesehatan
<b>5</b>	Masih lemahnya ketahanan air.	Pembangunan Infrastruktur
<b>6</b>	Belum optimalnya infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah	Pembangunan Infrastruktur
<b>7</b>	Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah dibidang pertanian, pariwisata, industri, koperasi, usaha mikro kecil menengah, perdagangan dan investasi	Peningkatan Pengelolaan Potensi Daerah
<b>8</b>	Belum optimalnya ketahanan pangan.	Peningkatan Pengelolaan Potensi Daerah
<b>9</b>	Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>10</b>	Belum terwujudnya kemandirian desa	Pembangunan Infrastruktur
<b>11</b>	Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran	Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
<b>12</b>	Belum optimalnya Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah (ketentraman ketertiban masyarakat, kerentanan konflik sosial/kehidupan beragama) serta pengelolaan bencana	Tata Kelola Pemerintahan Daerah
<b>13</b>	Masih rendahnya inovasi daerah dan teknologi tepat guna	Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Jadi, Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai berikut :

**1. Peningkatan Pengelolaan Potensi Daerah**

Potensi Kabupaten Purworejo meliputi sektor pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah serta investasi.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan penyumbang terbesar PDRB (26,09%) dan sebagian besar penduduk Kabupaten Purworejo bekerja di sektor pertanian (38,85%). Penduduk yang bekerja di sektor perdagangan 24,98%, sector industri 9,54%, sector jasa yang didalamnya termasuk bidang pariwisata 15,84%.

Lembaga koperasi yang aktif tahun 2015 sejumlah 230 koperasi dan yang sehat 122 koperasi. Sedangkan potensi Usaha Mikro Kecil sebanyak 22.584 UMK dan yang dibina 4173 UMK, hal ini merupakan potensi ekonomi daerah yang perlu ditingkatkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

**2. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran**

Angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo masih tergolong tinggi 14,41% (*sumber : BPS, tahun 2014*) atau secara mikro, penduduk sangat miskin dan miskin sebesar 188.644 orang (*sumber : PBDT, tahun 2015*). Pada tahun 2014, prosentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja sebesar 64,95%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,1%, tingginya angka kemiskinan, banyaknya penduduk sangat miskin dan miskin serta tingginya tingkat pengangguran terbuka, maka pengurangan kemiskinan dan pengangguran menjadi isu strategis yang perlu ditangani.

**3. Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan dan Kesehatan**

Kualitas dan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan. Kualitas pembangunan manusia yang diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat

ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2015 sebesar 13,04. Rata-rata lama sekolah sebesar 7,65 dan Angka Usia Harapan Hidup 74,03. Pada tahun 2015, Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan dasar meliputi PAUD (71,19%), APK SD (101,74%) dan APK SMP (98,14%) masih perlu ditingkatkan.

Di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan pemberantasan penyakit menular masih perlu pula untuk ditingkatkan dalam rangka meningkatkan usia harapan hidup.

#### **4. Pembangunan Infrastruktur**

Kondisi infrastruktur prasarana jalan di Kabupaten Purworejo tahun 2015, dari 747,33 km panjang jalan yang menjadi kewenangan daerah, kondisi baik dan sedang sebesar 572,14 km, kondisi rusak 100,09 km dan kondisi rusak berat 75,10 km. Sedangkan kondisi jembatan rusak berat dan runtuh sebesar 342,05 meter dari 4096,37 meter. Sedangkan akses infrastruktur dasar meliputi air bersih, sanitasi dan perumahan masih perlu untuk ditingkatkan. Tahun 2015 rumah tangga yang mempunyai sanitasi sebesar 77,63%, ketersediaan rumah layak huni 165.778 unit (82,03%) dan masih adanya kawasan kumuh sebesar 197,41 ha. Akses rumah tangga yang terlayani air bersih sebesar 182.112 KK (86,48%) dari 210.591 KK. Ketahanan air yang ditunjukkan dengan data rasio layanan air irigasi untuk tahun 2015 sebesar 72,03%, jadi cakupan pelayanan air irigasi masih perlu untuk ditingkatkan.

#### **5. Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Isu pembangunan berkelanjutan sudah menjadi isu global untuk menjaga planet bumi ini mempunyai daya dukung dan daya tampung lingkungan yang seimbang untuk kehidupan manusia. Indikator kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat dimana digambarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada

tahun 2015, IKLH sebesar 56,88%. Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah adalah untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## **6. Tata Kelola Pemerintahan Daerah**

Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Untuk mengarah ke Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), ketiga prinsip ini akan selalu diupayakan meningkat di segala bidang urusan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.